

**PEMERINTAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN MANFAAT SUMBER
DAYA WISATA**

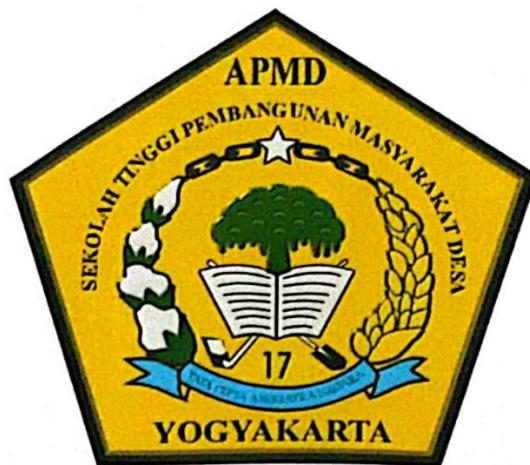
(Studi di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh :

CHOLILA AMALIYAH

21520090

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2025**



**PEMERINTAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN MANFAAT SUMBER
DAYA WISATA**

(Studi di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (S1)

Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

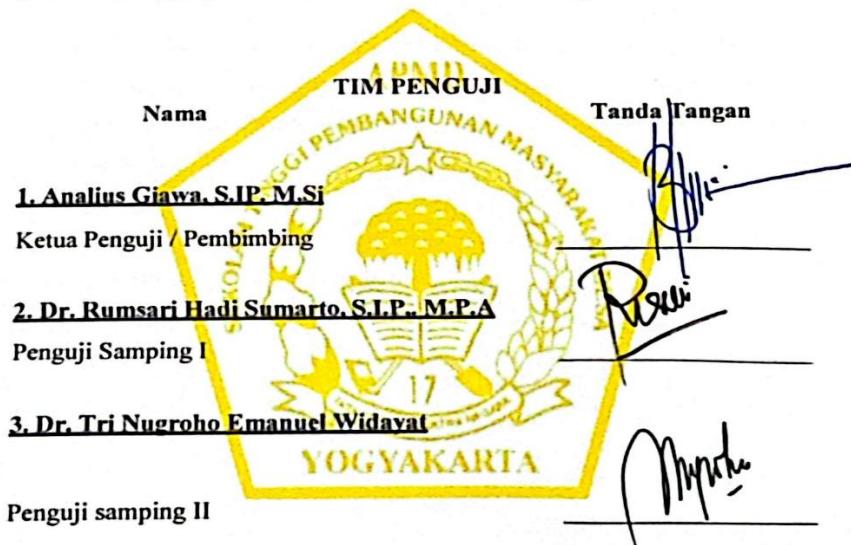
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 Januari 2025

Jam : 09.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cholila Amaliyah

Nim : 21520090

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Pemerintah Dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata Studi Di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Cholila Amaliyah

21520090

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Cholila Amaliyah
NIM : 21520090
Telp : 087725804399
Email : cholilaamaliyah13112002@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pemerintah dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata Studi di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara"

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang bertanda tangan


Cholila Amaliyah

21520090

MOTTO

“Libatkan allah dan orang tua dalam segala urusan agar yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah”
(lila amaliyah)

“Ibuku menaruhkan nyawanya demi kelahiranku, maka tidak mungkin jika kelahiranku tidak ada artinya”
(lila amaliyah)

شَقِّيَ رَبِّ بُدُّعَائِكَ أَكُنْ وَلَمْ

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu”
(QS-Maryam 4)

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ إِنَّ

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS- Al Insyirah 6)

“It will pass, evrything you've gone through it will pass”
(Rachel Venny)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugrakan Allah SWT sehingga tanggung jawab telah terselesaikan. Karya baru dan pengorbanan yang luar biasa terbingkai dari cinta dan kasih sayang. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku tersayang Ibu Kasiyati dan Bapak Muhammad Alimunsirin, Segala doa, cinta, dan pengorbanan kalian adalah fondasi dari setiap Langkah Sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana.
2. Untuk adek ku tercintah Muhammad Sachy Abdul Goffar yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, dukungan, dan tawa. Kehadiranmu memberikan semangat dan warna dalam setiap langkah perjalanan.
3. Untuk Nyai Sofiya, Yai Mulyono dan Mbah Nurlali yang ada di surga meskipun raga tidak ada di sini tetapi kasih sayang, doa dan nilai-nilai yang kalian tanamkan akan selalu hidup dalam diri saya. Serta Mbah Muamiyah trimakasih doa-doa dan ilmu yang diajarkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar.
4. Untuk keluarga besar yang ada di Karimunjawa trimakasih atas doa dan dukungan yang selalu menyelimuti di setiap perjuangan mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Berkat izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintah dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata Studi di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Analius Giawa, S.I.P, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.PA selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan serta masukan penulis.

6. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan penulis.
7. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membimbing, mengajar penulis selama kuliah 3 tahun.
8. Pemerintah Desa dan masyarakat Karimunjawa yang membekali banyak pengetahuan dan memberikan banyak pengalaman. memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahan evaluasi dan pedoman untuk masa mendatang. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi karya ilmiah. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal`Alamin.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Penulis

Cholila Amaliyah

21520090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
SUMMARY.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. <i>Literature Review</i>	8
F. Kerangka Konseptual	14
1. Pemerintahan Desa	14
2. Distribusi Kebijakan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Objek dan Subjek Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data	21
BAB II DESKRIPSI DESA KARIMUNJAWA DAN POTENSI SUMBER DAYA WISATA	23
A. Kondisi Geografis	23
1. Sejarah	23
2. Letak Wilayah	24
3. Luas Wilayah.....	25
B. Aspek Demografi	26
1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	26
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	26
1. Bedasarkan Agama.....	26
2. Keadaan Ekonomi	27
D. Sarana Prasarana	29
E. Struktur Pemerintah Desa.....	29
F. Potensi Sumber Daya Wisata	33
1. Pantai	33

2. Alam Bawah Laut.....	38
3. Hutan Bakau	40
4. Pulau	41
5. Satwa Langka	43
BAB III PEMERINTAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN MANFAAT SUMBER DAYA WISATA	44
A. Ketersediaan Tempat dan Potensial bagi Semua Pelaku Wisata.....	44
B. Kesempatan Ruang dan Waktu yang Di Berikan ke Semua Pelaku Wisata.....	50
C. Distribusi Terhadap Ketersediaan Produk Pariwisata seperti Kerajinan, Makanan, Layanan Jasa Bisa Dimanfaatkan Semua Pelaku Wisata atau Dinikmati oleh Segelintir Orang	58
D. Komunikasi yang Dibangun Antara Pemegang Kekuasaan dengan Masyarakat Pelaku Wisata	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	18
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk	26
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Bedasarkan Umur	26
Tabel 2.3 Agama Penduduk	28
Tabel 2.4 Pekerjaan Bedasarkan Profesi	29
Tabel 2.5 Data Perangkat Desa	31
Tabel 3.1 Data Pedagang Di Alun-Alun Karimunjawa.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Karimunjawa	25
Gambar 2.2 Bagan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa	31
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPD	33
Gambar 2.4 Pantai Boby	34
Gambar 2.5 Pantai Tanjung Gelam	35
Gambar 2.6 Pantai Batu Topeng	36
Gambar 2.7 Sunset	37
Gambar 2.8 Pantai Annora	38
Gambar 2.9 Alam Bawah Laut.....	39
Gambar 2. 10 Hutan Bakau	41
Gambar 2. 11 Pulau Menjangan Kecil	42
Gambar 2. 12 Pulau Menjangan Besar	43
Gambar 2. 13 Satwa Langka	44

INTISARI

Karimunjawa merupakan tempat yang dianugrahi Tuhan keindahan alam seperti pantai, pulau-pulau dan sumberdaya yang melimpah dari sisi laut tetapi di Karimunjawa masih banyak warga yang belum mendapatkan manfaat di tempat potensinya sediri. justru potensi yang ada di Karimunjawa sebagian besar dinikmati oleh orang yang lebih berpengaruh. Fokus penelitian ini mengkaji tentang Pemerintah Dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan melibatkan narasumber Kepala Desa, Perangkat Desa, pelaku wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu proses analisis data diawali dengan mengumpulkan informasi dan mengkaji data secara cermat kemudian mereduksi data untuk merangkum bagian-bagian penting.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;1) Potensi wisata dan sumber daya alam Karimunjawa belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal tetapi sebagian besar lebih banyak diakses oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi dan pihak lain.2) Partisipasi warga dalam sektor pariwisata terhambat oleh kebutuhan modal besar, membuat banyak penduduk lokal akhirnya terpinggirkan.3) Selain itu, keterbatasan ruang di kawasan alun-alun, khususnya untuk pedagang makanan khas, membatasi peluang usaha dan memunculkan keengganahan warga untuk berdagang di lokasi tersebut.4) Meski komunikasi antara warga dan pemerintah desa terbilang baik, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dengan melibatkan pihak-pihak relevan dalam diskusi, seperti sektor perikanan, agar lebih tepat sasaran.

Kata kunci : Distribusi, Keadilan Manfaat, Pemerintah Desa, Sumber daya.

SUMMARY

Karimunjawa is a place that has been blessed by God with natural beauty such as beaches, islands and abundant resources from the sea, but in Karimunjawa there are still many residents who have not benefited from this place of its own potential. In fact, the potential that exists in Karimunjawa is mostly enjoyed by more influential people. The focus of this research examines the Government in Distributing the Benefits of Tourism Resources.

This research uses an exploratory qualitative research method involving resource persons from the Village Head, Village Officials, tourism actors, community leaders and the community. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Then the data analysis process begins by collecting information and reviewing the data carefully, then reducing the data to summarize the important parts.

The results of this research show that; 1) Karimunjawa's tourism potential and natural resources have not been utilized optimally by local communities but are mostly accessed by people who have economic capabilities and other parties. 2) Citizen participation in the tourism sector is hampered by needs. large capital, making many local residents ultimately marginalized. 3) In addition, limited space in the square area, especially for specialty food traders, limits business opportunities and creates reluctance among residents to trade in that location. 4) Despite communication between residents and the government the village is fairly good, Its effectiveness still needs to be improved, especially by involving relevant parties in discussions, such as the fisheries sector, so that it is more targeted.

Keywords: Distribution, Fairness of Benefits, Village Government, Resources.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dengan tata kelola yang baik atau *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong peran serta masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, terwujudnya tujuan tersebut berarti pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki sistem pengelolaan, dan memberdayakan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mozin & Isa, 2023). Konsep ini mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga, dan sektor swasta untuk mencapai keadilan, kebaikan bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik berfokus pada kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, keadilan, inklusivitas, dan penegakan hukum yang adil untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang menciptakan budaya pemerintahan yang berfokus pada layanan publik dan peningkatan kualitas hidup. Distribusi sumber daya pariwisata yang seimbang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata dan alokasi sumber daya didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu,

setiap daerah yang memiliki daya tarik wisata harus mendapat perhatian dan dukungan yang sama dari pemerintah. Tujuan dari pendistribusian tersebut adalah mendorong pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan mengurangi ketergantungan. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui partisipasi dalam industri Pariwisata dan pemanfaatan potensi wisata lokal untuk menarik wisatawan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan industri pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi seluruh daerah, terutama daerah tertinggal.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam seperti pertambangan, minyak, gas, dan hasil hutan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Distribusi yang adil mengharuskan pemerintah mengelola sumber daya ini dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Kesetaraan ini memastikan bahwa setiap daerah dan kelompok masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap manfaat-manfaat seperti pembangunan ekonomi, lapangan kerja dan pelayanan publik. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, tujuan utama dari distribusi sumber

daya alam yang adil adalah untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pariwisata desa memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Dengan kekayaan alam, budaya, dan adat istiadatnya yang unik, desa-desa Indonesia dapat mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi alam yang melimpah, seperti gunung, hutan, sungai, dan perkebunan, dapat dioptimalkan melalui ekowisata atau agrowisata, di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan dan aktivitas pertanian. Pariwisata juga menawarkan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian daerah, dengan membuka lapangan pekerjaan di sektor jasa pariwisata seperti *homestay*, warung makan, dan toko kerajinan tangan. Selain itu, pariwisata desa juga mendukung pelestarian budaya dan adat istiadat setempat yang menjadi daya tarik wisatawan. Festival adat, kerajinan tangan khas, dan kuliner tradisional dapat dipromosikan lebih luas, sehingga memperkuat identitas lokal dan mendorong masyarakat untuk lebih menghargai warisan budaya mereka. Pengembangan infrastruktur dan amenities desa, seperti jalan, listrik, dan komunikasi, juga didorong oleh pariwisata. Pengelolaan pariwisata yang baik, terutama dalam konteks ekowisata, membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, yang juga menjadi daya tarik utama wisatawan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam mengelola potensi desa melalui pariwisata menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab serta memperkuat identitas lokal. Pariwisata juga mendorong inovasi dan diversifikasi

bisnis di desa, membuka peluang baru bagi petani, pengrajin, dan pengusaha kecil untuk mengembangkan produk dan layanan baru dan unik. Secara keseluruhan, pariwisata desa dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tetap melestarikan nilai-nilai budaya.

Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara yang terletak di Laut Jawa merupakan destinasi wisata yang kaya akan potensi desa, baik dari segi alam, budaya, maupun ekonomi. Keindahan alam Karimunjawa yang memukau dengan pantai-pantainya yang menawan dan berbagai terumbu karangnya, menjadikannya tempat yang ideal untuk kegiatan wisata bahari seperti snorkeling, scuba diving, dan sailing. Pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Menjangan dan Pulau Cemara, menawarkan keindahan alam yang tidak kalah menarik untuk dijelajahi. Selain keindahan alamnya, Karimunjawa juga memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata berkat statusnya sebagai taman nasional. Kegiatan konservasi, seperti penangkaran Penyu dan pengelolaan hutan bakau, tidak hanya menarik wisatawan yang peduli lingkungan, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Budaya lokal juga menjadi daya tarik tersendiri yang mana Desa-Desa Karimunjawa memiliki tradisi yang kaya, termasuk pembuatan perahu tradisional dan kerajinan tangan.

Pariwisata di Desa Karimunjawa ini menjadi salah satu cara alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Desa dengan kekayaan alam, budaya, dan tradisionalnya menarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dari kehidupan perkotaan. Pertumbuhan sektor pariwisata ini juga memberikan

dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, akomodasi, listrik dan telekomunikasi, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata tetapi juga kesejahteraan masyarakat setempat. Wisata di Desa Karimunjawa ini menciptakan banyak peluang ekonomi bagi penduduk setempat, termasuk pekerjaan sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku industri kuliner. Kehadiran wisatawan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk lokal seperti keripik rumput laut, nuggut ikan, kerupuk ikan dan masakan tradisional lainnya, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mereka. Pariwisata di Desa tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu melestarikan budaya dan lingkungan, sehingga menciptakan perekonomian yang lebih stabil di masa depan.

Namun, dengan potensi dan sumber daya alam yang besar masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pariwisata tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat peraturan di Karimunjawa yang mewajibkan seseorang yang ingin bekerja di bidang pariwisata memiliki pengalaman minimal dua tahun atau sudah lama tinggal di daerah tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan prioritas kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan sektor pariwisata dan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan pariwisata memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi lokal.

Namun pada implementasinya, peneliti menemukan banyak tempat yang berpotensi besar untuk pengembangan pariwisata di Karimunjawa justru dikuasai

investor dari luar daerah. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dominasi investor eksternal dapat membatasi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Situasi ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan yang memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Karimunjawa. Dengan kasus ini, pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mendistribusikan sumber daya alam di Desa Karimunjawa untuk memastikan warga mendapatkan manfaat dan kesejahteraan. Dengan distribusi yang tepat akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang mana ini akan meningkatkan pendapatan warga dan membantu mengurangi kemiskinan dan sumber daya wisata yang ada Di Karimunjawa ini dapat di nikmati oleh seluru masyarakat Karimunjawa. Hal ini mendorong peneliti melihat lebih dalam dari sisi pemerintahan menggunakan perseptif governing Maka dari itu penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Desa dalam mendistribusikan manfaat sumber daya wisata dengan penelitian ini harapnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta dapat memberikan perkembangan bagi Desa wisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana pemerintah dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata penelitian ini dilakukan di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara? ”.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan gambaran umum awal tentang situasi sosial melalui penulusuran umum (Sugiyono, 2020). Untuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam dengan pemilihan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan tempat dan potensial bagi semua pelaku wisata yang ada di Karimunjawa.
2. Bagaimana kesempatan ruang dan waktu yang diberikan kesemua pelaku wisata di Karimunjawa.
3. Bagaimana distribusi terhadap ketersediaan produk pariwisata seperti kerajinan, makanan khas, dan layanan jasa bisa dimanfaatkan semua pelaku wisata atau dinikmati oleh segelintir orangdi Karimunjawa.
4. Bagaimana komunikasi yang dibangun antara pemegang kekuasaan dengan Masyarakat pelaku wisata di Karimunjawa.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena, masalah, atau topik yang belum banyak diteliti mengenai Pemerintah Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi para pembaca dan menambah pemahaman yang lebih baik mengenai pemerintahan mendistribusikan manfaat sumber daya wisata Di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara mengenai pemerintah dalam mendistribusikan manfaat sumber daya wisata.

E. Literature Review

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemerintah dalam mendistribusikan manfaat sumber daya wisata.

1. Artikel yang ditulis oleh Gagih Paradini dalam Trun Jurnal Vol.2(1) Tahun 2022 yang berjudul Manfaat Ekonomi Kegiatan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat di Setu Babakan menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan, namun kontribusinya masih terbatas pada pekerjaan paruh waktu dan penyaluran dana pembangunan belum sepenuhnya merata. Meskipun manfaat ekonomi yang dihasilkan positif, tantangan dalam peningkatan pendapatan dan pemerataan manfaat di antara warga masih perlu diatasi.(Pradini, 2022).
2. Artikel yang ditulis oleh Fery Wijiyanto dan Etic Susilawati dalam Eastasouth journal of Effective Community Services Vol. 2, No. 02, Desember, 2023 yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti pelatihan dan dukungan untuk bisnis lokal. Hasilnya menunjukkan dampak positif berupa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, namun tantangan seperti pemerataan manfaat dan dampak negatif seperti polusi suara masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berperan penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih berkeadilan.(Wijayanto & Susilawati, 2023).

3. Artikel yang ditulis oleh Amelia Susanti yang berjudul “ Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan” Volume 1 Nomer 2, Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa belum optimal, terutama dalam melaksanakan asas kemandirian dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman tentang sistem perizinan dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun wisata awan memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan mendongkrak ekonomi lokal, Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa lebih aktif dalam mengelola pariwisata, meningkatkan fasilitas, dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.(Susanti, 2021).
4. Artikel yang ditulis oleh Jamal Al-Amin dan Afrizal Tjoetra dalam jurnal Society Volume 2, Nomer 2 September 2022 yang berjudul “ Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Naga Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator yang diidentifikasi, tiga indikator yaitu partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, dan penguatan kelompok masyarakat menunjukkan perkembangan positif. Namun dua indikator lainnya yaitu bagi hasil dan pemanfaatan sumber daya masih perlu ditingkatkan. Strategi pengembangan yang diusulkan antara lain menyediakan produk oleh-oleh lokal dan perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata. Secara keseluruhan, studi ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan

peluang dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Nagan Raya. (Jamal Al-Amin & Afrizal Tjoetra, 2022)

5. Artikel yang ditulis oleh Bonara Purba, Desry Rasmita Tarigan, dan Renata Olivia Ginting dalam economic review jurnal Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 yang berjudul “ Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sumber daya alam mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Namun tantangan terkait ketimpangan distribusi manfaat dan kerusakan lingkungan menjadi kekhawatiran utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dan penguatan peraturan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekologi (Purba et al., 2024).
6. Artikel yang ditulis oleh Indah Permatasari yang berjudul “Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali” Volume 16 Nomor 2 Tahun 2022. Dalam isi penelitian dijelaskan bagaimana pariwisata berbasis komunitas dapat memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengembangkan

pariwisata berkelanjutan, dan menyoroti pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pariwisata (Permatasari, 2022).

7. Artikel yang ditulis oleh Ari Kusuma Wardani dan Slamet Riyadi dalam Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2020 yang berjudul “ Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya Di Kabupaten Ciamis “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam pengembangan objek wisata budaya. Terciptanya komunitas yang mendukung konsep *Community Based Tourism* (CBT) dan peningkatan promosi melalui media sosial menjadi indikator keberhasilannya. Namun, masih terdapat tantangan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung (Wardani, A. K., & Riyadi, 2020).
8. Artikel yang ditulis oleh Eko Siahaan Dan Marina Simanjuntak yang berjudul Peran Masyarakat dan Pemerintahan dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah Pada Perkembangan Wisata Budaya Kampung Ulos Di Kawasan Samosir . Hasil dari penelitian ini Samosir, Sumatera Utara, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan potensi pariwisata budaya berperan krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, peran pemerintah tidak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah pada konteks yang sama, dengan nilai signifikansi $0,646 > 0,05$. Implikasinya, perlu peningkatan dalam dukungan dan strategi pemerintah untuk memperkuat dampaknya dalam mendukung

pengembangan wisata budaya dan ekonomi daerah di Kampung Ulos, Samosir, Sumatera Utara (Siahaan & Simanjuntak, 2024).

9. Artikel yang ditulis oleh Francicca Titing Koerniawati dalam Siswayang Jurnal yang berjudul “Destinasi Wisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Pariwisata Berkelanjutan” Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pencapaian ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan destinasi wisata yang efektif. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. (Titing Koerniawati, 2022).
10. Artikel yang ditulis oleh Ilham Zitri, Yhudi Lestana, dan Inka Nusamuda Pratama Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata BerbasisMasyarakat (Community Based Toursm)(Studi Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengembangan pariwisata berbasis masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip CBT, namun masih terdapat beberapa kendala yang signifikan, antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatasnya fasilitas pendukung industri pariwisata. (Ilham zitri et al., 2020).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang bagaimana peran pemerintah terhadap sumber daya. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pemerintah mendistribusikan manfaat sumber daya wisata.

Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif arti dari eksploratif adalah memahami serta menganalisis lebih dalam topik yang belum banyak di teliti dan penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah mendistribusikan manfaat sumber daya wisata.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Tugas pokok pemerintah desa adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis dan menyelenggarakan pelayanan sosial yang bermutu sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan berkeadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mozin & Isa, 2023).

Pemerintahan terdiri dari dua peran utama yaitu fungsi dasar dan fungsi regulasi. Fungsi dasar pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang

bermutu, memelihara ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kreativitas masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sedangkan fungsi regulasi mengacu pada perumusan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan mendorong pertumbuhan sejalan dengan tujuan nasional. Kedua fungsi ini saling mendukung untuk menjamin ketertiban dan efisiennya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Sari, 2022).

Fungsi pemerintahan dan peningkatan daya saing memerlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah yang memadai. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan sangat menentukan efektivitas pencapaian daya saing suatu negara atau daerah (Rahman et al., 2023).

Pemerintahan merupakan sistem yang menjalankan kekuasaan dan tanggungjawab untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kehidupan masyarakat di wilayah. Pemerintahan desa di Indonesia merupakan struktur yang paling rendah dalam sistem pemerintahan dan bertugas untuk memberikan pelayanan sosial berkualitas serta menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan bagi warganya.

2. Distribusi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dapat menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi. Pengembangan sektor pertambangan yang lebih baik, misalnya, dapat menghasilkan peningkatan produksi dan

pendapatan yang signifikan, baik bagi negara maupun masyarakat lokal. Dengan manajemen yang tepat, kebijakan ini mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada, memacu investasi, dan membuka lapangan kerja. Selain itu, kebijakan yang baik juga memperkuat kemampuan wilayah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas atau tekanan dari kompetisi global, sehingga menciptakan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang (Purba et al., 2024).

Agar kebijakan dapat memperkuat kemampuan wilayah dalam menghadapi tantangan ekonomi, maka perlu adanya beberapa saluran distribusi. Menurut Keegan dalam buku Koesworodjati, terdapat beberapa saluran distribusi, yaitu:

- a. pertama, tempat, yang berarti ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman bagi pelanggan potensial.
- b. kedua, waktu, yakni ketersediaan produk atau jasa saat dibutuhkan oleh pelanggan.
- c. ketiga, bentuk, yang mengacu pada kesiapan produk untuk digunakan dalam kondisi yang sesuai; dan
- d. keempat, informasi, berupa jawaban atas pertanyaan serta komunikasi tentang manfaat dan karakteristik produk.

Indikator distribusi ini dirancang agar perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran yang selaras dengan tujuannya, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai (Tasbikhi, 2019).

Indikator di atas bisa dikaitkan dengan indikator distribusi sumber daya yang mana sumber daya seperti potensi desa didistribusikan dan dimanfaatkan. Indikator utama mencakup ketersediaan, penggunaan, pemerataan ekonomi, dampak sosial, akses masyarakat kontribusi pembangunan, dan ketimpangan wilayah yang mana hal ini untuk menilai keadilan dan efisiensi pemanfaatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah yang tidak dipahami dengan baik atau informasi yang terbatas. Penelitian eksploratif bertujuan untuk memahami, mengamati, dan menganalisis secara mendalam suatu topik yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Penelitian ini lahir dari rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang tergolong baru atau kurang dipahami. Ciri-cirinya meliputi eksplorasi mendalam terhadap topik tertentu, fokus pada permasalahan yang jarang diketahui, penerapan pertanyaan 5W + 1H untuk memperoleh informasi detail, serta pendekatan yang kreatif, fleksibel, dan terbuka dalam pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan baru, mengenali pola dan mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat diteliti lebih lanjut. Biasanya, metode ini digunakan pada tahap awal penelitian untuk merumuskan masalah atau hipotesis yang lebih jelas (Sodik & Siyoto, 2015).

2. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), objek dalam penelitian diartikan sebagai atribut, karakteristik, atau nilai dari seseorang, benda, objek tersebut dipilih oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan. oleh karena itu objek penelitian ini pemerintah dalam mendistribusikan manfaat sumber daya wisata di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini sudah dilaksanakan dengan deskripsi narasumber sebagai berikut:

Tabel.1. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan/ Pekerjaan	Usia	Tingkat Pendidikan	Tanggal Wawancara
1	Arif Setiawan	Kepala Desa	41	SMA	11-12-2024
2	Herman Effendi	Kasi Pemerintah Desa	44	SMA	11-12-2024
3	Solichul	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan	52	SMA	11-12-2024
4	Fahrul Alim	BPD	53	SMP	12-12-2024
5	Muhammad Zaini	BPD	40	SMP	13-12-2024
6	Abdul Syukur	Tokoh Masyarakat	38	SMA	12-12-2024
7	Dafid Arianto	Tokoh Masyarakat	32	S1	13-12-2024

8	Sholikul Hadi	Tokoh Masyarakat	62	SD	13-12-2024
9	Andri	Paguyuban Kapal	29	SMA	13-12-2024
10	Umroatul Hilaliyah	Pegawai Bank	24	S1	9-12-2024
11	Mafrundho	Tukang Batu	52	SMP	9-12-2024
12	Solichatul Faiza	Pedagang	33	SMA	11-12-2024
13	Zaki Syaifudin	Pemilik Hottel	21	SMA	7-12-2024
14	Yusuf Bakhtiar	Tour Guid	35	S1	7-12-2024
15	Eko Yunanto	Nelayan	43	SMP	17-12-2024

Sumber: Data Olah Peneliti 2024

Teknik pemilihan narasumber melalui pendekatan penentuan langsung atau bisa di sebut purposif. Dari data informan diatas peneliti banyak menemukan data dari Fahrul Alim selaku BPD dan Sholikul Hadi selaku Tokoh Masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang di gunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumber data maupun sampel penelitian menurut (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mana peneliti secara langsung mengamati objek atau fenomena dalam lingkungan aslinya. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang detail dan akurat mengenai

perilaku, situasi, atau kondisi tertentu. Observasi deskriptif dilakukan ketika penelitia memasuki suatu wilaya sosial yang menjadi objek penelitian. Pada tahap ini, penelitian belum memiliki masalah spesifik untuk diteliti sehingga observasi dilakukan secara umum dan menyeluruh dengan tujuan menggambarkan segala sesuatu yang di amati. Hasil pengamatan ini masih dalam bentuk data mentah yang belum terorganisir (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi di Karimunjawa dan wawancara terhadap Masyarakat dan pelaku wisata yang berkaitan dengan penerima manfaat di potensi Karimunjawa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan, kemudian pewawancara dan responden bertemu secara langsung. Untuk memperoleh data yang bermakna, wawancara dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dalam mengumpulkan informasi, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai sumber dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji informasi dan data tertentu (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Dalam penelitian ini , peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang konkret mengenai pemerintah dalam mendistribusikan manfaat sumber daya wisata yang ada di Karimunjawa.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan arsip dan buku yang memuat pendapat, teori, dalil, atau undang-undang. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan cara utama dalam mengumpulkan data, karena pengujian hipotesis dilakukan secara logis dan rasional, baik untuk mendukung maupun menolak hipotesis, berdasarkan pendapat, teori, atau hukum yang relevan (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Dalam penelitian ini dokumentasi pengenai kebijakan pemerintah Desa, dokumen wisata, dokumen aktifitas, dokumen aturan dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif. Proses analisis data diawali dengan mengkaji data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan lain-lain. Data yang tersedia umumnya sangat banyak. Langkah pertama adalah membaca, mempelajari, dan meninjau data dengan cermat. Setelah itu dilakukan reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data melalui abstraksi. Abstraksi bertujuan untuk merangkum bagian-bagian penting, inti data, proses-proses relevan dan pernyataan-pernyataan yang perlu dipertahankan. Data yang telah dirangkum kemudian diorganisasikan ke dalam satuan-satuan informasi tertentu. Pada langkah

selanjutnya, unit-unit informasi dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan tujuan analisis (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).

Dalam melakukan teknik analisis data pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaku yang berkaitan dengan distribusi manfaat sumber daya wisata. Lalu peneliti memeriksa data untuk memastikan data tidak ada kesalahan atau data yang hilang selanjutnya mengelola data dengan melakukan kategorisasi bedasarkan tema dan terakhir yaitu kesimpulan hasil analisis berdasarkan temuan yang didapat.

BAB II

DESKRIPSI DESA KARIMUNJAWA

DAN POTENSI SUMBER DAYA WISATA

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah

Dikutip dari profil SMK Negri 1 Karimunjawa Sejarah dan legenda karimunjawa asal usul dari Sunan Nyamplungan Ia memiliki nama asli Amir Hasan, putra Sunan Muria. Sejak kecil hingga dewasa, Amir Hasan dimanjakan oleh ibunya, Nyai Sunan Muria, meskipun ia dikenal sebagai anak yang nakal. Melihat hal ini, Sunan Muria berusaha menanamkan kedisiplinan dan mengajarkan dasar-dasar agama Islam kepada Amir Hasan. Namun, perilaku nakal dan manja Amir Hasan membuat Sunan Muria dan Nyai Sunan Muria memutuskan untuk menitipkannya kepada pamannya, Sunan Kudus, dengan harapan Amir Hasan dapat menjadi pribadi yang baik dan saleh di bawah asuhan pamannya. Di bawah bimbingan Sunan Kudus, Amir Hasan mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi pemuda yang baik dan taat menjalankan ajaran agama. Setelah merasa cukup membimbingnya, Sunan Kudus mengembalikan Amir Hasan kepada Sunan Muria. Mendengar kabar tersebut, Sunan Muria sangat gembira dan memutuskan untuk menguji kesungguhan Amir Hasan. Sunan Muria memerintahkannya pergi ke sebuah pulau yang terlihat samar-samar (kremun-kremun) dari puncak Gunung Muria. Amir Hasan diberi bekal berupa dua biji buah nyamplung untuk ditanam, serta

barang-barang lain seperti Mustaka Masjid yang hingga kini masih berada di kompleks makamnya. Setelah perjalanan panjang melintasi laut, Amir Hasan tiba di pulau tersebut dan menetap di sana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Karimunjawa. Karena adanya pohon nyamplung di pulau tersebut, masyarakat setempat mengenal Amir Hasan sebagai “Sunan Nyamplungan.”

2. Letak Wilayah

Karimunjawa berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Lokasinya terletak di sisi barat daya Pulau Jawa, dekat Jepara. Pulau Karimunjawa berada di bagian tengah Kepulauan Karimunjawa yang terletak di tengah Laut Jawa. Pulau ini bersama kepulauannya merupakan bagian dari Busur Karimunjawa, yang membentang dari timur laut ke barat daya dan memisahkan Cekungan Laut Jawa Barat dari Cekungan Laut Jawa Timur. Busur ini diyakini terbentuk akibat proses rifting di tepian barat laut Australia-Gondwana selama Periode Jura, yang kemudian menyatu dengan Paparan Sunda pada awal Kala Kapur. Selain itu, busur ini menjadi bagian dari batas selatan wilayah Paparan Sunda.

Gambar.2.1 Peta Karimunjawa



Sumber: Citra satelit Kepulauan Karimunjawa, September 2019

3. Luas Wilayah

Kepulauan Karimunjawa yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, memiliki total luas wilayah sebesar 111.625 hektar. Wilayah ini terdiri dari daratan Pulau Karimunjawa yang mencakup area seluas 1.285,50 hektar dan daratan Pulau Kemujan dengan luas 222,20 hektar. Selain itu, perairan di sekitar kepulauan ini mencakup wilayah seluas 110.117,30 hektar. Terdiri dari 27 pulau. Pulau-pulau tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni meliputi Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk, Parang, dan Genting. Sementara itu, pulau-pulau tidak berpenghuni mencakup Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Cemara Besar, Cemara Kecil, Geleyang (30 hektar), Burung, Bengkoang (92 hektar), Kembar (11,2 hektar), Katang (2,8 hektar), Krakal Besar (2,8 hektar), Krakal Kecil (2,8 hektar), Sintok, Mrican, Tengah, Pinggir, Cilik

(2 hektar), Gundul, Seruni, Tambangan, Cendekian, Kumbang (8,8 hektar), dan Mencawakan yang juga dikenal sebagai Pulau Menyawakan.

B. Aspek Demografi

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk	Jumlah (Jiwa)
Jumlah Laki-Laki	3.009
Jumlah Perempuan	618
Jumlah Total	3.627

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Dukcapil Kemendagri 2022

Berdasarkan data jumlah penduduk, tercatat sebanyak 3.009 orang adalah laki-laki, sementara jumlah perempuan mencapai 618 orang. Secara keseluruhan, total jumlah penduduk di wilayah ini adalah 3.627 orang. Data ini menunjukkan adanya perbedaan proporsi yang cukup signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

1. Bedasarkan agama

Table.2.3 Agama Penduduk

AGAMA	LAKI-LAKI (JUMLAH)	PEREMPUAN (JUMLAH)
Islam	3.354	3.061
Kristen	30	30
Khatolik	5	3
Kepercayaan	1	
Jumlah	3.390	3.094

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari (DKB) Tahun 2022, Dukcapil

Kemendagri

Kondisi keberagaman agama di Karimunjawa dapat dilihat dari data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama yang dianut. Dari total penduduk laki-laki, terdapat 3.354 orang yang memeluk agama Islam, 30 orang beragama Kristen, 5 orang beragama Katolik, dan 1 orang menganut kepercayaan lokal, sehingga totalnya mencapai 3.390 orang. Sementara itu, dari sisi perempuan, tercatat 5.061 orang beragama Islam, 30 orang Kristen, dan 3 orang Katolik, dengan jumlah keseluruhan mencapai 5.094 orang. Data ini mencerminkan dominasi penduduk yang beragama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, dan kepercayaan lokal.

2. Keadaan ekonomi

Tabel 2.4 Pekerjaan Bedasarkan Profesi

Jenis Pekerjaan	Laki -laki (jumlah)	Perempuan (jumlah)
Petani	74	15
Buruh Tani	63	35
Pegawai Negri Sipil	126	103
Pengrajin Industri Rumah Tangga	156	131
Pedagang Keliling	22	
Montir	2	
Nelayan	749	
Bidan Swasta		1
Pembantu Rumah Tangga		7
Pensiunan PNS TNI PORLI	1	
Pengusaha Kecil Dan Menengah	7	5
Jumlah Total	1.497	

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Dokumen 2023

Masyarakat Karimunjawa memiliki berbagai jenis pekerjaan yang mencerminkan keanekaragaman aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan data, pekerjaan dengan jumlah terbanyak adalah nelayan, di

mana 749 orang laki-laki bekerja di sektor ini. Hal ini mencerminkan dominasi sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama di Karimunjawa. Selain itu, terdapat 74 laki-laki dan 15 perempuan yang bekerja sebagai petani, serta 63 laki-laki dan 35 perempuan yang menjadi buruh tani. Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga cukup banyak, dengan 126 laki-laki dan 103 perempuan berkarir di sektor pemerintahan. Di bidang usaha kecil, pengrajin industri rumah tangga menjadi salah satu pekerjaan yang cukup signifikan, dengan 156 laki-laki dan 131 perempuan terlibat. Sementara itu, pedagang keliling tercatat sebanyak 22 orang, sedangkan montir berjumlah 2 orang. Profesi lainnya termasuk bidan swasta yang tercatat 1 orang perempuan, pembantu rumah tangga sebanyak 7 orang perempuan, serta pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 1 orang laki-laki. Pengusaha kecil dan menengah juga ada, dengan 7 laki-laki dan 5 perempuan menjalankan usaha di sektor ini. Secara keseluruhan, jumlah total penduduk yang terdata berdasarkan jenis pekerjaan ini mencapai 1.497 orang. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Karimunjawa memiliki mata pencaharian yang beragam, meskipun sektor perikanan tetap menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Untuk data kemiskinan menurut yang mendapatkan PKH sebanyak 114 orang.

D. Sarana Prasarana

Table.2.4 Sarana Prasarana

Inventaris dan alat tulis kantor	2 buah
Jumlah mesin tik	1 buah
Jumlah meja	10 buah
Jumlah kursi	88 buah
Jumlah almari arsip	3 buah
Komputer	3 unit
Kendaraan dinas	2 unit

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Profil Desa 2023

Fasilitas dan sarana pendukung kantor Desa menunjukkan ketersediaan infrastruktur yang belum cukup memadai. Inventaris kantor meliputi dua unit alat tulis kantor, satu mesin tik, 10 meja, 88 kursi, dan tiga almari arsip untuk penyimpanan dokumen. Selain itu, terdapat tiga unit komputer yang mendukung pekerjaan administrasi, serta dua kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional kantor. Fasilitas ini mencerminkan kesiapan administrasi dan operasional yang cukup baik untuk menunjang pelayanan masyarakat.

E. Struktur Pemerintah Desa

Tabel.2.5

DATA PERANGKAT DESA

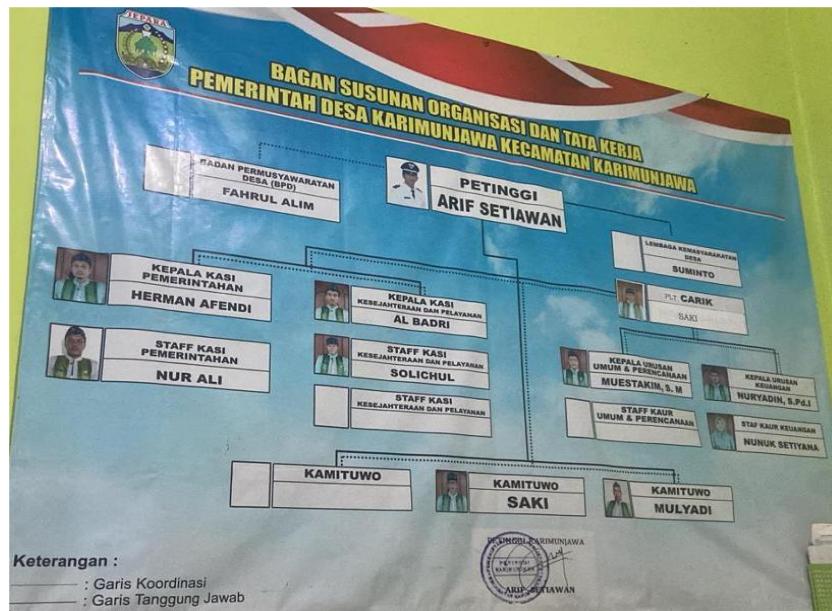
Jabatan	Nama	Tingkat Pendidikan
Kepala Desa	Arif Setiawan	SMA
PLT Carik	Saki	SMA
Kepala Kasi Kesejahteraan Pelayanan 1	Albadri	SMA

Staf Kasi Kesejahteraan 2	Solichul	SMA
Kepala Kasi Pemerintahan 1	Herman Afendi	SMA
Staf Kasi Pemerintahan	Nur Ali	SMA
Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan	Muestakim	S.M
Kepala Urusan Keuangan	Nuryadin	S.Pd.I
Staf Urusan Keuangan	Nunuk Setiyana	SMA

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Dokumen Profil Desa 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KARIMUNJAWA

Gambar.2.2



Sumber: Kantor Desa Karimunjawa 2023

Pemerintahan Desa adalah lembaga yang menjalankan Pemerintahan di tingkat desa dan dipimpin oleh Kepala Desa sebagai direktur eksekutif. Peranan Pemerintah Desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab melaksanakan pembangunan, penguatan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik. Badan ini bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merumuskan kebijakan, peraturan desa, dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DATA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Gambar.2.3



Sumber: Kantor Desa Karimunjawa 2024

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan sebagai wakil masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan memantau pelaksanaan pemerintahan Desa. BPD berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun dan menyetujui peraturan Desa dengan Kepala Desa, serta memantau kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan BPD bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga dalam pembangunan Desa.

F. Potensi Sumber Daya Wisata

Karimunjawa memiliki banyak potensi wisata alam yang diantaranya :

1. Pantai

a. Pantai Bobby

Gambar.2.4



Sumber Gambar: GoogleMaps_Zulfa Farhaana

Pantai Bobby merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak di kawasan timur Karimunjawa, tepatnya di Jalan Kapuran, Karimunjawa. Pantai ini menawarkan panorama alam yang memukau, terutama saat pagi hari. Keindahan matahari terbit atau sunrise di Pantai Bobby menjadi daya tarik utama yang tidak boleh dilewatkan oleh para pengunjung.

Lokasi pantai ini cukup strategis, dengan jarak sekitar 3 kilometer dari pusat kota Karimunjawa. Akses yang mudah membuatnya semakin populer di kalangan wisatawan. Pantai Bobby dapat dicapai hanya dalam waktu singkat menggunakan sepeda

motor, sehingga banyak pengunjung yang memilihnya sebagai destinasi untuk menikmati pagi yang indah di Karimunjawa.

Kombinasi antara keindahan alam, aksesibilitas, dan suasana yang menenangkan menjadikan Pantai Bobby pilihan sempurna untuk melepas penat dan menikmati pesona Karimunjawa.

b. Tanjung Gelam

Gambar.2.5



Sumber Gambar: GoogleMaps_Stefano D'Amico

Pantai Tanjung Gelam adalah salah satu pantai ikonik di Karimunjawa yang telah terkenal sejak lama, bahkan sebelum pantai-pantai lainnya mulai dikenal luas. Keistimewaan pantai ini tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada nilai historis dan sakralnya bagi masyarakat setempat.

Pantai ini menjadi lokasi yang wajib dikunjungi oleh masyarakat Karimunjawa pada tradisi Lebaran Ketupat, yang dirayakan enam hari setelah Idulfitri. Dalam tradisi ini, Pantai

Tanjung Gelam menjadi tempat berkumpul dan melaksanakan ritual yang sarat makna budaya.

Selain nilai tradisionalnya, pantai ini juga menawarkan pemandangan sunset yang memukau. Berada di ujung pulau, pengunjung dapat menikmati momen matahari terbenam yang indah, menjadikan Pantai Tanjung Gelam destinasi yang ideal untuk menikmati keajaiban alam sembari meresapi kekayaan tradisi lokal Karimunjawa.

c. Batu Topeng

Gambar.2.6



Sumber: komunitas Travelling

Pantai Batu Topeng merupakan salah satu destinasi yang tak kalah populer dibandingkan pantai-pantai lainnya di Karimunjawa. Dengan hamparan pasir putih yang bersih dan batu-batu unik berbentuk menyerupai topeng, pantai ini memiliki daya tarik tersendiri yang memikat wisatawan. Keindahan Pantai Batu Topeng menjadikannya favorit, terutama bagi wisatawan asing

yang mencari tempat untuk berjemur. Suasana pantai yang tenang dan alami menciptakan pengalaman relaksasi yang sempurna. Pemandangan yang indah dan suasana yang damai menjadikan Pantai Batu Topeng destinasi ideal bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam Karimunjawa dalam kedamaian.

d. Sunset

Gambar:2.7



Sumber: Sunset Beach Karimunjawa

Pantai Sunset adalah salah satu destinasi beach club paling terkenal di Karimunjawa, yang selalu ramai pengunjung. Tempat ini menawarkan suasana santai dengan pasir putih yang menawan, serta berbagai hiburan yang menarik perhatian wisatawan.

Salah satu daya tarik utama Pantai Sunset adalah ragam pilihan minuman, mulai dari minuman beralkohol hingga minuman halal, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Tak heran, pantai ini menjadi favorit tidak hanya bagi wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing yang ingin menikmati suasana pantai sambil

bersantai. Pantai ini juga sering menjadi tuan rumah berbagai acara hiburan, seperti pertunjukan DJ terkenal dan tarian-tarian yang memeriahkan suasana. Dengan kombinasi hiburan, keindahan alam, dan suasana yang meriah, Pantai Sunset menjadi pilihan sempurna untuk menikmati liburan yang seru dan berkesan di Karimunjawa.

e. Annora

Gambar.2.8



Sumber: Biro Wisata Karimunjawa

Pantai Annora merupakan salah satu pantai di Karimunjawa yang terletak paling jauh dibandingkan pantai-pantai lainnya. Meskipun lokasinya cukup terpencil, keindahan pantai ini tak kalah memukau. Dengan hamparan batu-batuan yang unik dan pemandangan laut yang dapat dinikmati dari atas bukit, Pantai Annora menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan

pengalaman alam yang berbeda. Meskipun jaraknya dari pusat kota Karimunjawa terbilang cukup jauh, perjalanan menuju pantai ini akan terbayar lunas begitu melihat panorama menakjubkan dari puncak bukitnya. Pantai ini menawarkan suasana yang tenang dan pemandangan yang luar biasa, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota.

Pantai Annora, bersama pantai-pantai lainnya di Pulau Karimunjawa, dapat diakses dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Jarak tempuh dari pusat kota Karimunjawa ke pantai-pantai tersebut bervariasi, mulai dari 10 menit hingga sekitar 1 jam perjalanan. Dengan akses yang relatif mudah, wisatawan memiliki fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai destinasi pantai yang ada di pulau ini dan menikmati pesona alam yang menawan.

2. Alam bawah laut

Gambar.2.9



Sumber: <https://www.paketwisatakarimunjawa.com/2013/01/paket-liburan-ke-karimunjawa.html>

Karimunjawa dikenal sebagai surga bawah laut dengan kekayaan terumbu karang yang memukau. Lokasi ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama mereka yang gemar berenang dan menikmati keindahan pemandangan bawah laut. Terumbu karang yang dilindungi di kawasan ini menawarkan jutaan warna yang memikat, menciptakan pengalaman menyelam yang tak terlupakan. Salah satu daya tarik yang paling digemari adalah ikan nemo yang mudah ditemukan di sekitar terumbu karang. Kehadiran ikan-ikan lucu ini semakin memperkaya keindahan ekosistem laut Karimunjawa. Wisatawan sering kali membawa roti tawar sebagai makanan untuk menarik ikan-ikan tersebut mendekat ke permukaan laut, sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dan mengabadikan momen berharga bersama ikan-ikan tersebut melalui foto. Pesona bawah laut Karimunjawa tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan edukatif, menjadikannya destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para pecinta alam dan keindahan laut.

3. Hutan bakau

Gambar.2.10



Sumber: <https://www.tourkarimunjawa.net/2018/01/hutan-mangrove-karimunjawa.html>

Hutan mangrove di Karimunjawa memiliki luas sekitar 222,2 hektar dan menjadi rumah bagi beragam jenis tanaman bakau. Kawasan ini terletak di Desa Kemujan dan dapat diakses dengan mudah melalui jalan utama yang menghubungkan Karimunjawa dan Kemujan. Perjalanan menuju hutan mangrove dapat dilakukan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari pusat kota Karimunjawa, tepatnya dari Alun-Alun Karimunjawa. Akses yang cukup baik memungkinkan wisatawan menikmati perjalanan dengan nyaman sembari menikmati pemandangan sekitar. Setibanya di lokasi, pengunjung akan disambut oleh pintu gerbang hutan mangrove yang menjadi tanda memasuki kawasan hijau ini.

Hutan mangrove di Karimunjawa tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga ekosistem pesisir, memberikan pengalaman wisata yang edukatif sekaligus menyegarkan.

4. Pulau

Gambar.2.11



Sumber: pulau Menjangan Kecil Paket Wisata Karimunjawa

Pulau menjangan kecil merupakan pulau yang sering dikunjungi oleh pariwisatawan, jarak tempuh 30 menit dari pusat kota dengan menggunakan kapal pulau ini tidak kalah menajubkan yang mana dengan pasir putih dan pulau yang luas bisa dijadikan tempat bersantai dan piknik. Pulau ini juga terdapat penangkaran hiu yang bisa di jadikan tempat foto tetapi tetap dalam pengawalan

Gambar.2.12



Sumber: Penangkaran Hiu Pulau Menjangan Besar

Pulau menjangan besar ini merupakan pulau yang paling terdekat dari pusat kota, yang mana bisa di tempuh hanya dalam 5 menit dengan menggunakan kapal. Pulau ini juga terkenal dengan penangkaran hiu dan juga bisa dijadikan tempat untuk berfoto. Tidak hanya penangkaran tetapi pulau ini menawarkan hotel didalam yang bertepatan di depan penangkaran tersebut, tentunya sangat menarik perhatian para wisatawan yang ingin menginap dan langsung melihat hiu di sepanjang harinya.

Karimunjawa mempunyai 27 pulau dan hanya 4 yang berpenghuni. Gambar diatas merupakan pulau yang sering serta paling banyak diminati oleh para wisatawan yang berlibur di Karimunjawa.

5. Satwa Langka

Gambar.2.13



Sumber:Taman Nasional Karimunjawa

Karimunjawa menjadi rumah bagi berbagai satwa langka yang mempesona. Salah satunya adalah elang laut dada putih, burung laut terbesar di dunia dengan bentangan sayap mencapai 3 meter, yang kerap terlihat di Pulau Ghundul dan menjadi fauna identitas. Selain itu, terdapat dua spesies penyu yang dilindungi dan terancam punah, yakni penyu hijau dan penyu sisik. Lalu keberadaan ular edor, reptil khas Karimunjawa dengan kepala berbentuk menyerupai bendor atau panah, menambah keunikan fauna di kawasan ini. Selain itu, terdapat kima, salah satu biota laut yang dilindungi, yang semakin menegaskan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem Karimunjawa.

BAB III

PEMERINTAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN MANFAAT SUMBER DAYA WISATA

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan penjelasan secara rinci mengenai temuan yang diperoleh. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan. Wawancara ini berfokus adalah membahas pemerintah dalam mendistribusikan manfaat sumber daya pariwisata. Distribusi ini memerlukan proses panjang dan penuh pertimbangan yang menyoroti kompleksitas pengelolaan dan pengalokasian manfaat pariwisata agar dapat dibagi secara merata oleh berbagai pemangku kepentingan.

A. Ketersediaan Tempat dan Potensial Bagi Semua Pelaku Wisata

Ketersediaan tempat yang cukup dan potensial sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Lokasi yang memadai meliputi fasilitas fisik seperti tempat parkir, akomodasi, pusat informasi dan atraksi yang mudah diakses oleh wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan tetapi juga mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tujuan.

Selain itu, potensi wisata baik keindahan alam, budaya maupun rekreasi harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan lokasi potensial menawarkan peluang bagi berbagai pemangku kepentingan pariwisata seperti operator tour, pemilik usaha kecil, masyarakat lokal, dan

pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pengelolaan pariwisata. Dengan melibatkan semua pihak, maka terciptalah ekosistem pariwisata yang saling mendukung. Pemerataan akses terhadap tempat-tempat wisata juga berperan penting dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, keberadaan tempat wisata yang potensial dan inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sektor pariwisata berkelanjutan. Bedasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan Arif Setiawan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“ di Karimunjawa belum banyak tersedia tempat-tempat yang bisa diolah dimaksimalkan untuk sebagai objek wisata fasilitas yang terbatas, bahkan ada beberapa fasilitas yang tidak ada aturan atau sop yang membuat proses kelayakanya rendah, Saat ini pemerintah Desa sedang mencari solusi dengan berkomunikasi dengan pelaku wisata serta investor dan pemodal dengan harapan wisatawan tidak membawa pengalaman buruk selama berkunjung di Karimunjawa.” (11 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Di Karimunjawa masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas yang dapat dimaksimalkan sebagai tempat wisata unggulan. Beberapa fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar kelayakan karena belum adanya aturan terstruktur atau belum diterapkannya standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini dapat berdampak pada pengalaman berkunjung wisatawan. Saat ini, pemerintah desa berupaya mencari solusi melalui komunikasi aktif dengan para pelaku wisata, investor, dan pemodal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan, sehingga dapat memberikan pengalaman positif dan

berkesan bagi wisatawan yang datang ke Karimunjawa. Kemudian wawancara kepada Fahrul Alim selaku ketua BPD mengatakan bahwa:

“Saat ini diperkirakan pemenuhan kebutuhan para pelaku pariwisata di Karimunjawa baru mencapai 30% dari total potensi yang ada, hal ini disebabkan oleh belum meratanya distribusi manfaat pariwisata. Manfaat ekonomi dari sektor pariwisata sebagian besar hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang terlibat langsung, seperti pemandu wisata, penjual cinderamata, atau penyedia paket wisata. Namun mayoritas pelaku usaha penyedia paket wisata bukan berasal dari masyarakat asli Karimunjawa, dan sebagian besar kepemilikan tempat wisata dikuasai oleh pendatang atau investor luar. Akibatnya, manfaat pariwisata belum menjangkau sebagian besar masyarakat lokal, terutama mereka yang bekerja di sektor tradisional seperti nelayan.” (12 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pelaku wisata di Karimunjawa saat ini masih jauh dari optimal, dengan tingkat pemenuhan yang diperkirakan hanya mencapai sekitar 30% dari total potensi yang ada. Salah satu penyebab utama adalah ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Hingga saat ini, sebagian besar keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok kecil masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata, seperti pemandu wisata, penjual suvenir, dan penyedia paket wisata.

Namun, terdapat kendala struktural yang mempersempit peluang masyarakat lokal untuk menikmati manfaat ini. Sebagian besar pelaku usaha di bidang paket wisata bukanlah penduduk asli Karimunjawa. Selain itu, kepemilikan mayoritas objek wisata di kawasan ini dikuasai oleh pendatang atau investor luar, yang sering kali memanfaatkan sumber daya lokal tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Akibatnya, sebagian besar masyarakat lokal, terutama mereka yang bekerja di sektor tradisional seperti nelayan, belum merasakan dampak positif yang berarti dari pengembangan pariwisata. Data ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat yang terlibat langsung atau terdampak oleh sektor pariwisata dapat menikmati manfaat ekonomi secara signifikan. Sementara itu, 70% lainnya masih belum mengalami perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Situasi ini menuntut adanya langkah strategis yang lebih inklusif untuk memastikan pemerataan manfaat pariwisata. Pemerintah dan pihak terkait perlu merancang kebijakan yang memberdayakan masyarakat lokal secara lebih luas, baik melalui peningkatan akses terhadap peluang usaha di sektor pariwisata, pemberian pelatihan keterampilan, maupun penguatan regulasi agar investasi dan pengelolaan objek wisata lebih melibatkan masyarakat asli. Dengan demikian, pariwisata di Karimunjawa dapat berkembang menjadi sektor yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian wawancara Yusuf Bakhtiar selaku tour guid mengatakan :

”Ketersediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pelaku wisata di Karimunjawa saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di berbagai destinasi wisata. Selain itu, distribusi manfaat wisata bagi masyarakat lokal juga belum merata. Dengan karakteristik wilayah Karimunjawa yang terdiri dari banyak pulau, masih terdapat beberapa wilayah yang belum merasakan dampak positif dari perkembangan sektor pariwisata secara signifikan”. (7 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Fasilitas dan pemenuhan kebutuhan bagi pelaku wisata di Karimunjawa saat

ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah kurangnya fasilitas yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas di berbagai destinasi wisata. Hal ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan wisata yang inklusif, di mana setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menikmati pengalaman wisata dengan nyaman dan aman.

Selain itu, distribusi manfaat pariwisata di Karimunjawa juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sebagian besar keuntungan dari sektor ini masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau wilayah tertentu yang lebih berkembang. Sementara itu, banyak masyarakat lokal, terutama yang berada di pulau-pulau kecil yang menjadi bagian dari Karimunjawa, belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari pengembangan pariwisata. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses, kurangnya infrastruktur, serta minimnya peluang kerja atau usaha di sektor pariwisata bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Karakteristik geografis Karimunjawa, yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang beragam, turut menjadi tantangan dalam memastikan pemerataan manfaat pariwisata. Wilayah-wilayah yang lebih terpencil cenderung kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan destinasi wisata maupun peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Kondisi ini menuntut perlunya strategi yang terencana dan terarah untuk meningkatkan inklusivitas dan pemerataan manfaat pariwisata.

Langkah-langkah seperti pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas ke pulau-pulau terpencil, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan peluang usaha, menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan adil di Karimunjawa. Dengan pendekatan ini, pariwisata tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian wawancara dengan Dafid Arianto selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“ Dari segi sarana prasaranya baik walaupun belum sepenuhnya, karna Karimunjawa sendiri itu besar jadi untuk perkembangan dan pemerataanya belum 100%” (13 Desember 2024).

Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dari segi sarana dan prasarana, Karimunjawa telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Karimunjawa, yang terdiri dari banyak pulau, sehingga pemerataan fasilitas menjadi tantangan tersendiri. Proses pengembangan infrastruktur masih terus berlangsung, namun belum mencapai 100% untuk mencakup seluruh wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan adanya peraturan di Karimunjawa yang mensyaratkan bahwa seseorang yang ingin menjadi pelaku wisata di wilayah tersebut harus memiliki pengalaman minimal dua tahun atau telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama di Karimunjawa. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan prioritas kepada

masyarakat lokal dalam mengelola sektor pariwisata dan memastikan bahwa pelaku wisata memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal.

Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa banyak tempat potensial untuk pengembangan pariwisata di Karimunjawa justru dikuasai oleh investor dari luar daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Dominasi investor luar ini berpotensi membatasi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya dirasakan oleh penduduk asli Karimunjawa. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

B. Kesempatan Ruang dan Waktu yang diberikan Ke Semua Pelaku Wisata

Memberikan kesempatan yang sama secara spasial dan temporal bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata merupakan langkah penting dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang spasial mengacu pada akses yang adil terhadap fasilitas, lokasi strategis, dan peluang bisnis, baik bagi usaha kecil lokal, masyarakat adat, dan operator pariwisata besar. Hal ini dapat mencakup penyediaan tempat untuk usaha katering, usaha kerajinan, penyewaan peralatan wisata dan pengelolaan homestay yang digunakan oleh masyarakat setempat. Pemerintah dan pengelola dapat memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara langgeng oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pembagian ruang dan waktu yang merata ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam dan sosial Karimunjawa. Keterlibatan yang setara dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata tidak hanya menciptakan sinergi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, namun juga mendorong perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Melalui kebijakan yang mendukung akses ruang dan waktu bagi seluruh pemangku kepentingan, Karimunjawa dapat terus menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan dan memperkuat komunitas lokal. Bedasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan Arif Setiawan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“ Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata di Karimunjawa belum merata, diperkirakan sekitar 50% hingga 60% masyarakat benar-benar merasakan dampaknya secara signifikan. Mayoritas penduduk Karimunjawa masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan. Meskipun terdapat peluang bagi nelayan untuk beralih ke pariwisata, terutama ketika ada kunjungan wisatawan, namun perubahan tersebut bersifat musiman. Sedangkan wisata sekala besarnya ada di Desa karimunjawa yang dikotanya dan pulau yang lain hanya mendapatkan sedikit sehingga tidak merata”. (11 Desember 2024).

Hasil kesimpulan wawancara di atas menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata di Karimunjawa belum merata di kalangan masyarakat. Berdasarkan perkiraan, sekitar 50% hingga 60% dari total penduduk merasakan dampak positif pariwisata secara signifikan, sedangkan sisanya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sektor ini. Mayoritas penduduk Karimunjawa masih menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai mata pencahariannya utama. Meskipun nelayan berpotensi beralih ke sektor pariwisata, terutama pada musim turis,

namun peralihan tersebut bersifat musiman dan bergantung pada fluktuasi jumlah wisatawan yang datang.

Konsentrasi kegiatan pariwisata yang besar terdapat di Desa Karimunjawa yang merupakan pusat administrasi dan perekonomian wilayah tersebut. Sebaliknya, pulau-pulau lain hanya mengalami dampak yang terbatas dan peluang yang kecil untuk mengembangkan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat pariwisata yang masih terkonsentrasi pada satu wilayah, sedangkan wilayah lain belum sepenuhnya merasakan pemerataan manfaat. Kondisi ini menuntut perlunya strategi pengembangan pariwisata yang lebih inklusif, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Karimunjawa, termasuk di pulau-pulau terpencil. Kemudian wawancara kepada Sholikul Hadi sebagai tokoh Masyarakat mengatakan:

“Pariwisata di Karimunjawa saat ini menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat yang sebagian besar dinikmati oleh kelompok tertentu yang mempunyai modal, seperti pemilik hotel, kapal, dan persewaan peralatan snorkeling. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran masyarakat lokal, terutama masyarakat ekonomi bawah, dalam merasakan manfaat dari sektor pariwisata. Hingga saat ini Karimunjawa belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai pembagian manfaat antara masyarakat lokal dengan pelaku usaha atau biro pariwisata, sehingga berdampak pada ketimpangan distribusi keuntungan. Meskipun tempat wisata di kawasan ini telah memenuhi sebagian besar syarat pengembangan, namun belum ada mekanisme yang menjamin keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.” (13 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh Masyarakat disimpulkan bahwa Pariwisata di Karimunjawa saat ini menghadapi permasalahan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang sebagian besar dirasakan oleh

kelompok tertentu yang memiliki modal dan sumber daya, seperti pemilik hotel, kapal, dan perusahaan peralatan snorkeling. Kelompok ini menguasai sebagian besar kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, sementara masyarakat lokal, terutama yang berada pada strata ekonomi bawah, belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari sektor pariwisata. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ketimpangan distribusi keuntungan yang dihasilkan sektor pariwisata.

Hingga saat ini Karimunjawa belum memiliki peraturan yang jelas mengenai distribusi manfaat antara masyarakat lokal dan pelaku usaha pariwisata, baik perorangan maupun biro pariwisata. Ketidakjelasan peraturan tersebut mengakibatkan distribusi keuntungan yang tidak merata, dimana sebagian besar manfaat ekonomi terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, sedangkan masyarakat lokal belum sepenuhnya terlibat atau memperoleh manfaat dari sektor ini.

Meskipun tempat wisata di Karimunjawa telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk pengembangan lebih lanjut, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan pemerataan manfaat memperburuk ketimpangan ini. Tanpa kebijakan yang terstruktur dan inklusif, yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor ini akan terus terkonsentrasi pada beberapa pihak saja dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk merumuskan peraturan yang lebih adil dan merata dalam

mendistribusikan manfaat pariwisata kepada seluruh lapisan masyarakat di Karimunjawa. Kemudian wawancara kepada Mafrundho selaku tukang batu menyatakan bahwa:

“mengenai pariwisata memang tidak terdampak karena tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam wisata, dan memang memilih untuk jadi tukang batu karna sudah ahli dari dulu” (9 Desember 2024).

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di Karimunjawa tidak merasakan dampak langsung dari sektor Pariwisata, salah satunya karena kurangnya akses untuk masuk dan berpartisipasi dalam aktivitas wisata. Hal ini mencakup keterbatasan peluang kerja atau usaha yang terkait dengan pariwisata, serta minimnya keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut.

Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk tetap menjalani profesi tradisional mereka, seperti menjadi tukang batu. Profesi ini telah mereka tekuni sejak lama, dengan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Pilihan ini dianggap lebih stabil dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dibandingkan mencoba terjun ke sektor pariwisata yang memerlukan akses, modal, dan keterampilan baru. kemudian wawancara kepada Umroatul Hilaliyah selaku pegawai bank menyatakan bahwa:

“ Saya belum merasakan dampak langsung dari manfaat sektor pariwisata, mengingat profesi saya sebagai pegawai bank. Namun, apabila ingin terlibat dalam sektor pariwisata, diperlukan keahlian khusus serta modal yang cukup besar. Misalnya, untuk membuka usaha paket wisata, selain keterampilan dalam manajemen usaha, juga dibutuhkan investasi dalam pembuatan situs web dan infrastruktur digital lainnya, yang memerlukan biaya yang signifikan. Selain itu, masih banyak biaya lainnya yang harus dipertimbangkan, sehingga keterlibatan dalam sektor ini cenderung terbatas bagi individu yang

tidak memiliki sumber daya finansial yang mencukupi”.(9 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari manfaat sektor pariwisata, karena pada dasarnya pekerjaan utamanya adalah sebagai pegawai bank. Namun, jika ingin terjun ke sektor pariwisata sebagai pelaku usaha, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit.

Untuk menjadi bagian dari pelaku pariwisata, diperlukan keahlian khusus serta modal yang tidak kecil dan jika ingin membuka usaha seperti paket wisata, tidak hanya memerlukan persiapan operasional, tetapi juga harus membangun kehadiran digital, seperti membuat website untuk mempromosikan layanan. Pembuatan website ini sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar, belum termasuk kebutuhan lain seperti alat pendukung, sumber daya manusia, dan pengelolaan operasional.

Selain itu, persaingan di sektor ini juga cukup ketat, terutama dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki modal dan pengalaman lebih. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin beralih ke sektor pariwisata, diperlukan dukungan berupa pelatihan, kemudahan akses permodalan, dan kebijakan yang mempermudah partisipasi. Dengan demikian, manfaat dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemudian wawancara kepada Eko yunanto sebagai nelayan mengatakan bahwa :

“ Manfaat pariwisata sejauh ini belum terkena dampak karena saya lebih fokus dengan pekerjaan saya yaitu nelayan, untuk ikut ke dalam

pelaku wisata belum mumpuni karena keterbatasan akses” (17 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan juga belum merasakan manfaat langsung dari pariwisata karena masih fokus pada pekerjaan sebagai nelayan. Beralih menjadi pelaku wisata belum memungkinkan, terutama karena keterbatasan akses dan kesiapan. Kendala seperti kurangnya modal, pengetahuan, serta jaringan yang dibutuhkan dalam sektor pariwisata membuat sulit bagi nelayan untuk ikut terlibat. Selain itu, peralihan profesi memerlukan pelatihan dan dukungan yang belum sepenuhnya tersedia.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan temuan yang relevan mengenai kondisi pariwisata di Karimunjawa. Diketahui, mayoritas pelaku usaha di sektor pariwisata seperti pemilik hotel dan persewaan alat selam berasal dari luar pulau, baik orang asing maupun pendatang dari luar Karimunjawa. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sektor pariwisata, dimana sebagian besar kendali usaha pariwisata tidak berada di tangan masyarakat lokal.

Ironisnya, meski Karimunjawa memiliki potensi wisata alam yang melimpah, namun masyarakat setempat terjebak pada posisi yang jauh dari kata strategis di sektor tersebut. Banyak warga sekitar yang bekerja sebagai buruh di tempat-tempat milik pihak luar, tanpa mendapatkan manfaat yang setara dari potensi wisata di daerahnya. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena masyarakat lokal tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata, namun juga

terpinggirkan dalam hal pembagian keuntungan dari sektor yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Fenomena ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan pariwisata, dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan merasakan manfaat sektor pariwisata secara langsung. Distribusi keuntungan yang lebih adil dan pemberdayaan masyarakat lokal merupakan aspek penting dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan dan adil di Karimunjawa.

Hal ini bedasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tetapi di Karimunjawa, kenyataannya belum adanya pemerataan pemanfaatan sumber daya pariwisata, sehingga mengakibatkan masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang sepadan dengan potensi alam yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun Karimunjawa memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti keindahan alam bawah laut dan kekayaan ekosistemnya, namun sebagian besar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, seringkali masyarakat hanya mendapat sebagian kecil dari potensi yang ada, sedangkan pihak luar, termasuk investor dan pelaku usaha dari luar daerah, lebih dominan dalam mengelola dan memperoleh keuntungan dari sektor pariwisata.

Fenomena ini menggambarkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, dimana masyarakat lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru cenderung menjadi pihak yang terpinggirkan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, sehingga masyarakat lokal dapat lebih berpartisipasi aktif dan merasakan manfaat dari potensi alam yang mereka miliki. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan model pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung, baik dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pembagian keuntungan, untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Distribusi Terhadap Ketersediaan Produk Pariwisata seperti Kerajinan, Makanan, Layanan Jasa Bisa Dimanfaatkan Semua Pelaku Wisata atau Dinikmati Oleh Segelintir Orang

Distribusi yang merata terhadap produk pariwisata, seperti kerajinan, makanan khas, dan layanan jasa, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Karimunjawa. Saat ini, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa manfaat dari sektor ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, seperti pelaku usaha besar atau pihak luar, tetapi juga oleh seluruh pelaku wisata, termasuk masyarakat lokal. Produk-produk pariwisata seperti kerajinan tangan dan makanan khas dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat setempat untuk terlibat langsung

dalam industri pariwisata. Namun, tanpa distribusi yang adil dan akses yang memadai, potensi ini sering kali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal yang sama berlaku untuk layanan jasa, seperti pemandu wisata, transportasi lokal, atau penyewaan alat snorkeling. Jika layanan ini didominasi oleh pelaku usaha besar atau pihak luar, masyarakat lokal akan kesulitan bersaing dan kehilangan peluang untuk berkontribusi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong distribusi yang lebih inklusif. Pemerintah dan pengelola pariwisata dapat membantu dengan memberikan pelatihan, memfasilitasi pemasaran produk lokal, dan menciptakan kebijakan yang memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat setempat. Dengan cara ini, produk pariwisata di Karimunjawa tidak hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua pihak. Bedasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan Arif Setiawan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“ Produk-produk UMKM seperti kerajinan tangan dan makanan khas, meski tidak semua masyarakat terlibat dalam kegiatan perdagangan, namun banyak yang ikut serta dalam usaha tersebut di alun-alun. Di alun-alun disediakan area khusus bagi para pedagang yang menjual berbagai produk, seperti ikan bakar, oleh-oleh, dan makanan khas lainnya. Bagi pelaku industri pariwisata diharapkan mempunyai domisili tetap di Karimunjawa, dengan syarat bagi perorangan dari luar daerah harus tinggal minimal dua tahun di Karimunjawa sebelum dapat berpartisipasi.” (11 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Produk UMKM di Karimunjawa, khususnya kerajinan tangan dan makanan khas,

menjadi pilar penting dalam perekonomian masyarakat setempat. Meski tidak semua warga terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan ini, namun banyak yang ikut aktif memasarkan produk tersebut, baik di pasar lokal maupun di tempat wisata. Salah satu lokasi strategis yang disediakan untuk kegiatan perdagangan ini adalah alun-alun yang menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat.

Alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai kawasan komersial pendukung UMKM. Di sana para pedagang bisa menjual berbagai produk lokal, mulai dari ikan bakar yang merupakan kuliner khas Karimunjawa, hingga berbagai jenis oleh-oleh yang menggambarkan budaya dan keunikan pulau ini. Makanan khas lainnya yang seringkali dibuat dari bahan-bahan lokal juga menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung.

Selain itu, dalam rangka pengembangan industri pariwisata, terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku pariwisata di Karimunjawa harus berdomisili tetap di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterikatan yang kuat terhadap wilayah dan budaya setempat. Bagi individu yang berasal dari luar Karimunjawa, terdapat persyaratan khusus yaitu harus tinggal di Karimunjawa minimal dua tahun sebelum dapat terlibat dalam kegiatan industri pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata lokal, serta memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam

perekonomian berbasis pariwisata. Kemudian wawancara dengan Solichatul Faiza sebagai pedagang makanan khas mengatakan bahwa:

“Keberadaan area berjualan di alun-alun memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal, meskipun jumlah tempat yang tersedia terbatas. Produk-produk seperti makanan khas Karimunjawa, termasuk ikan asin, kerupuk ikan, stik cumi, dan lainnya, dapat diproduksi oleh masyarakat secara luas. Namun, keterbatasan ruang yang ada di alun-alun menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan, karena ruang yang terbatas tersebut membatasi jumlah pedagang yang dapat berjualan.” (11 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan area di alun-alun Karimunjawa berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk lokal. Alun-alun sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai pusat perdagangan tidak hanya memperkenalkan berbagai produk khas daerah, namun juga menjadi sarana mempererat interaksi sosial dan budaya antar masyarakat. Produk-produk seperti ikan asin, kerupuk ikan, stik cumi dan makanan khas lainnya yang menjadi ciri khas Karimunjawa dapat banyak diproduksi oleh warga sekitar yang sebagian besar berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun meski potensinya cukup besar, terbatasnya jumlah tempat yang tersedia di alun-alun menjadi kendala yang cukup besar. Keterbatasan ruang membuat kapasitas area penjualan tidak bisa menampung seluruh pelaku UMKM yang berminat berpartisipasi. Keterbatasan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan peluang berjualan, dimana hanya pedagang tertentu

saja yang dapat memanfaatkan wilayah tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa kurang termotivasi atau enggan untuk terlibat dalam aktivitas berdagang di alun-alun, karena persaingan memperebutkan ruang yang terbatas, sehingga berdampak pada aksesibilitas bagi pedagang baru maupun pedagang lama.

Fenomena ini menunjukkan tantangan pengelolaan ruang publik yang optimal untuk mendukung keberagaman produk lokal dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efisien dalam pengalokasian ruang dan peningkatan fasilitas pendukung, sehingga seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pasar dan memperluas jaringan distribusi produknya. Kemudian wawancara dengan Herman Effendi sebagai perangkat Desa bahwa:

“ Tidak seluruh warga Karimunjawa terlibat dalam industri pengrajinan atau perdagangan produk khas daerah. Berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga, terdapat 742 individu yang bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya yang tidak terlibat langsung dalam sektor perikanan atau industri pengolahan produk lokal, memiliki peluang untuk berjualan makanan khas daerah. Namun, partisipasi dalam kegiatan perdagangan ini tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat, melainkan oleh segmen tertentu dari populasi yang tertarik atau memiliki kesempatan untuk terlibat dalam usaha tersebut.” (11 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman pekerjaan yang dimiliki masyarakat Karimunjawa mencerminkan beragamnya partisipasi mereka dalam sektor perekonomian lokal, khususnya pada industri kerajinan dan perdagangan produk khas

daerah. Berdasarkan data yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga, sektor perikanan merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk, dengan 742 jiwa tercatat bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan ini mendominasi jenis mata pencaharian di Karimunjawa yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sementara bagi sebagian warga yang tidak berkecimpung langsung di sektor perikanan atau industri pengolahan hasil laut, terdapat alternatif peluang untuk ikut serta dalam perdagangan produk lokal, seperti makanan khas daerah. Peluang ini dimanfaatkan sejumlah kalangan dengan menjual berbagai jenis kuliner khas Karimunjawa seperti ikan asin, kerupuk ikan, dan stik cumi yang merupakan produk unggulan daerah.

Namun partisipasi dalam kegiatan perdagangan tersebut belum merata pada seluruh masyarakat. Hanya kelompok masyarakat tertentu yang terlibat dalam usaha ini, yang umumnya terdiri dari individu-individu yang mempunyai minat dalam perdagangan atau mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, keterampilan, dan pasar.

Fenomena ini mencerminkan peluang wirausaha yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan tingkat keterampilan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong inklusivitas pengembangan sektor UMKM, sehingga lebih banyak warga, terutama yang tidak bergerak di sektor utama seperti

perikanan, dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ditawarkan produk-produk khas daerah Karimunjawa.

Tabel.3.6. Pedagang Di Alun Alun Karimunjawa

NO	NAMA PEDAGANG	UNIT
1	Faiza	Ikan Bakar
2	Bu Sate	Ikan Bakar
3	Zawana	Ikan Bakar
4	Harlina	Ikan Bakar
5	Wati	Ikan Bakar
6	Degan	Kelapa Bakar
7	Saiful	Angkringan
8	Mimin	Jus
9	Yani	Es The
10	Rohma	Angkringan
11	Daton	Bakso
12	Pak Yono	Makanan
13	Kalim	Makanan
14	Bu Lastri	Makanan
15	Luth	Makanan
16	Junet	Nasi Goreng
17	Sydir	Angkringan
18	Rumiseh	Ikan Asin
19	Upik	Ikan Asin
20	Talita	Ikan Asin
21	Nurul	Ikan Asin
22	Liana	Ikan Asin
23	Yanti	Ikan Asin
24	Lina	Ikan Asin
25	Sofi'i	Sovenir
26	Gofur	Sovenir
S27	Bagus	Sovenir
28	Prianto	Sovenir
29	Ari	Sovenir
30	Yudha	Sovenir
31	Muslikin	Sovenir
32	Febri	Sovenir
33	Pecah Belah	Sovenir
34	Gerandong	Sovenir
35	Kejora	Sovenir
36	TOTAL	35

Sumber: Data Olahan Peneliti Dari Informasi Desa 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa di Karimunjawa telah disediakan kawasan khusus untuk berjualan sebagai upaya menunjang kegiatan perekonomian setempat. Namun keberadaan tempat penjualan tersebut memiliki keterbatasan yang cukup besar, terutama terkait kapasitas ruang yang tersedia. Alun-alun di Karimunjawa meskipun berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, namun luasnya relatif terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk berjualan. Keterbatasan ruang ini berdampak pada banyaknya pedagang yang dapat memanfaatkan kawasan tersebut, sehingga tidak semua warga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas perdagangan di alun-alun.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan ruang publik secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor UMKM. Terbatasnya wilayah berjualan di alun-alun menyebabkan ketimpangan distribusi peluang ekonomi sehingga berdampak pada kemampuan warga dalam mengakses pasar dan memasarkan produknya. Akibatnya, sebagian masyarakat akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam perdagangan, terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung ke tempat yang tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam perencanaan dan pengelolaan ruang publik yang dapat menampung lebih banyak pelaku ekonomi lokal, serta menciptakan peluang yang lebih setara bagi masyarakat Karimunjawa untuk berkontribusi dalam kegiatan perdagangan dan pembangunan ekonomi daerah.

D. Komunikasi yang Dibangun Antara Pemegang Kekuasaan dengan Masyarakat Pelaku Wisata

Komunikasi yang efektif antara pemegang kekuasaan, seperti pemerintah daerah atau pengelola pariwisata, dengan masyarakat pelaku wisata di Karimunjawa sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata. Hubungan yang baik melalui komunikasi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di sektor pariwisata.

Pertama, komunikasi yang terjalin baik memungkinkan pemerintah memahami kondisi nyata masyarakat, termasuk kendala yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses modal, pelatihan, atau fasilitas pendukung pariwisata. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif. Kedua, dialog yang terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, seperti usulan peningkatan fasilitas umum, pembagian manfaat ekonomi, atau kebutuhan pemberdayaan. Komunikasi dua arah ini memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Ketiga, kolaborasi yang terjalin melalui komunikasi dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengembangkan pariwisata Karimunjawa.

Misalnya, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, sementara pemerintah berperan dalam memberikan regulasi dan dukungan infrastruktur. Tanpa komunikasi yang baik, potensi konflik,

ketimpangan manfaat, atau ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pariwisata Karimunjawa tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan Arif Setiawan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Setiap diskusi dengan publik cenderung melibatkan beragam pendapat, baik yang mendukung maupun menentang. Hal ini merupakan dinamika yang wajar dalam proses komunikasi sosial. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat krusial untuk menjaga keseimbangan dan menjadi mediator berbagai kepentingan yang ada. Pemerintah desa melalui pendekatan komunikasi yang efektif diharapkan mampu berdiri di tengah dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin seperti diskusi dengan perwakilan RT/RW dan lembaga masyarakat, guna mencapai kesepahaman mengenai peran pemerintah desa dan visi misi kepala desa. Melalui forum-forum tersebut, dilakukan upaya untuk mencapai kesatuan suara, yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif ”. (11 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa setiap diskusi yang melibatkan masyarakat seringkali menghadirkan beragam pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang, tergantung pada latar belakang, kepentingan, dan persepsi individu atau kelompok. Hal ini merupakan bagian dari dinamika sosial yang wajar dalam setiap proses komunikasi yang melibatkan publik. Ketegangan antara pendapat yang berbeda dapat muncul sebagai konsekuensi dari adanya berbagai aspirasi dan prioritas yang tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat penting untuk memastikan terciptanya proses komunikasi yang

sehat dan berimbang. Pemerintah desa diharapkan dapat bertindak sebagai mediator yang objektif, menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, dan mengarahkan diskusi ke arah yang konstruktif.

Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, pemerintah desa berupaya untuk memfasilitasi dialog yang terbuka dan transparan antara masyarakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari RT/RW serta paguyuban yang ada di desa. Forum-forum ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pandangan, mencari titik temu, dan mencapai kesepahaman bersama tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan, serta untuk menyosialisasikan visi dan misi kepala desa. Dengan seringnya pertemuan dan diskusi, diharapkan dapat tercipta konsensus yang lebih luas, di mana masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama dengan tujuan yang sama.

Melalui proses ini, diupayakan agar tercapai kesepahaman yang seragam, sehingga suara masyarakat dapat dikonsolidasikan dan diperkuat. Hal ini akan memperkokoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, pendekatan seperti ini juga dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan mempererat hubungan antara pemerintah dan warga, menciptakan iklim yang lebih harmonis dalam pengelolaan desa dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian wawancara dengan Muhammad Zaini selaku BPD mengatakan bahwa:

“ Pelaksanaan musyawarah desa umumnya diawali dengan penentuan agenda pembahasan, yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum rapat dimulai. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan keterlibatan pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah. Biasanya, yang terlibat dalam musyawarah adalah perwakilan dari RT/RW, meskipun topik yang dibahas tidak selalu berkaitan langsung dengan isu-isu desa secara umum, melainkan juga mencakup sektor-sektor spesifik seperti perikanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas musyawarah, sebaiknya partisipan yang diundang disesuaikan dengan topik yang dibahas. Misalnya, dalam musyawarah yang membahas perikanan, yang diundang seharusnya adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor tersebut, agar diskusi dapat berjalan lebih terarah dan konstruktif. Dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan, diharapkan dapat tercapai titik temu yang lebih jelas dan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan yang dibahas”. (12 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Secara umum, setiap musyawarah desa diawali dengan penentuan agenda atau topik yang akan dibahas, yang harus dipahami dan disepakati oleh semua pihak sebelum rapat dimulai. Penentuan agenda ini bertujuan agar rapat dapat berjalan dengan fokus dan tujuan yang jelas. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan musyawarah sering menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterlibatan peserta yang tidak selalu relevan dengan topik yang dibahas.

Selama ini, musyawarah desa umumnya melibatkan perwakilan dari RT/RW sebagai peserta utama. Namun, masalah muncul ketika topik yang dibahas tidak selalu berkaitan langsung dengan isu-isu desa secara umum. Sebagai contoh, dalam musyawarah yang membahas sektor perikanan, tidak

jarang pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan atau keterkaitan langsung dengan bidang tersebut, sehingga diskusi tidak berjalan secara optimal. Kendala ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam pemilihan peserta musyawarah sesuai dengan topik yang akan dibahas.

Untuk meningkatkan efektivitas musyawarah desa, sangat penting agar partisipan yang diundang disesuaikan dengan sektor atau isu yang dibahas. Dalam hal ini, misalnya, jika topik musyawarah berkaitan dengan perikanan, maka yang seharusnya diundang adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor tersebut, baik sebagai pelaku usaha perikanan, nelayan, atau pihak terkait lainnya. Dengan demikian, diskusi dapat berjalan lebih terarah dan konstruktif, karena peserta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.

Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan topik yang dibahas, musyawarah desa akan lebih produktif dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Selain itu, proses ini akan memperkuat rasa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kemudian wawancara dengan Abdul Syukur selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, jarang ditemui perbedaan pendapat yang signifikan antara pihak yang pro dan kontra, meskipun terkadang terdapat permasalahan yang terkesan sepele. Hal ini dapat diatasi dengan pendekatan musyawarah mufakat, yang merupakan metode yang umum diterapkan untuk mencapai kesepahaman bersama. Kemungkinan besar, sikap masyarakat yang cenderung mendukung

atau mengikuti keputusan bersama dapat dijelaskan oleh budaya lokal yang mengedepankan kekeluargaan dan keharmonisan dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah mufakat ini memungkinkan tercapainya solusi yang diterima oleh mayoritas, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama tanpa adanya konflik yang berarti”. (12 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan di masyarakat Karimunjawa jarang terjadi, meskipun kadang ada isu-isu kecil yang bisa menimbulkan pro dan kontra. Namun, hal tersebut umumnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Proses musyawarah mufakat ini memungkinkan semua pihak untuk berdiskusi dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama, sehingga konflik atau perbedaan pendapat bisa dihindari atau diminimalisir. Mungkin sebagian besar warga di sini lebih memilih untuk mengikuti keputusan bersama atau bersikap pro terhadap kebijakan yang diambil, karena mereka memahami pentingnya kebersamaan dan kedamaian dalam komunitas. Dengan pendekatan ini, meskipun ada perbedaan pandangan, masyarakat cenderung mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan menjaga keharmonisan.

Musyawarah mufakat ini bukan hanya cara untuk menyelesaikan masalah kecil, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong yang masih kuat di masyarakat Karimunjawa. Dengan terus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, proses pengambilan keputusan bisa berjalan lebih lancar dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Kemudian wawancara Solichul selaku perangkat Desa mengatakan bahwa:

“ Pada awalnya, terdapat banyak perbedaan pendapat antara pihak yang pro dan kontra terhadap berbagai kebijakan atau keputusan yang diambil. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi pertemuan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti paguyuban kapal, pemandu wisata (tour guide), serta pelaku wisata lainnya, semakin meningkat. Proses ini memungkinkan terjalinnya dialog yang lebih intensif dan saling memahami. Ketika belum tercapai kesepahaman atau satu suara, pemerintah atau pihak terkait akan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan berbagai aspek dan manfaat dari kebijakan yang diusulkan. Sebagai hasil dari proses tersebut, saat ini hampir seluruh pihak dapat menerima keputusan yang diambil, dengan mayoritas mendukung dan sepakat terhadap arah yang ditetapkan, menciptakan kesepahaman dan dukungan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan”. (11 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sering kali terjadi perbedaan pendapat atau pro-kontra di kalangan masyarakat Karimunjawa, terutama terkait isu-isu pembangunan atau kebijakan yang melibatkan sektor pariwisata. Namun, seiring berjalannya waktu, adanya pertemuan rutin seperti paguyuban kapal, pertemuan dengan tour guide, dan pelaku wisata lainnya telah membantu menjembatani perbedaan tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pihak-pihak yang terlibat bisa saling berdiskusi, berbagi pandangan, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketika belum ada kesepakatan atau satu suara di antara mereka, pemerintah desa atau pihak berwenang biasanya melakukan sosialisasi untuk menjelaskan kebijakan atau keputusan yang diambil. Proses sosialisasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada semua pihak mengenai tujuan dan manfaat dari keputusan tersebut.

Kini, berkat komunikasi yang lebih intens dan terbuka, hampir semua pihak telah mencapai kesepakatan bersama dan berada dalam satu suara. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam membangun keharmonisan di

masyarakat, di mana setiap elemen pelaku wisata dan masyarakat dapat menyatukan visi mereka demi kepentingan bersama dan keberlanjutan pariwisata di Karimunjawa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diskusi bersama seringkali tidak mencerminkan relevansi permasalahan yang dibicarakan. Secara umum, dalam proses musyawarah atau diskusi, pemerintah desa cenderung lebih sering mengundang perwakilan RT/RW, padahal topik yang dibahas berkaitan dengan sektor tertentu seperti perikanan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peserta yang diundang dengan permasalahan yang dibicarakan sehingga dapat mengurangi efektivitas diskusi.

Idealnya, dalam musyawarah yang membahas topik tertentu seperti perikanan, partisipasinya harus melibatkan individu atau kelompok yang mempunyai hubungan langsung dengan sektor tersebut, seperti nelayan, pelaku usaha perikanan, atau pihak-pihak yang berkompeten di bidang perikanan. Keterlibatan mereka akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dibahas, serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk lebih selektif dalam mengundang peserta musyawarah, dengan mempertimbangkan relevansi topik yang dibahas agar pembahasan dapat berjalan lebih fokus dan menghasilkan solusi yang lebih tepat dan efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi wisata dan sumber daya alam Karimunjawa belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, namun lebih banyak diakses dan dinikati oleh investor serta individu yang memiliki kemampuan ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik, sehingga masyarakat lokal cenderung terpinggirkan dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya..
2. Peluang untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata di Karimunjawa pada umumnya memerlukan modal yang besar, Hal ini menjadi kendala utama yang mengakibatkan banyak penduduk lokal yang tidak mampu bersaing dan akhirnya terpinggirkan dari kegiatan ekonomi pariwisata. Dan distribusi ketersediaan produk belum merata untuk masyarakat sekitar wisata Karimunjawa.
3. Komunikasi antara warga dan pemerintah desa cenderung baik, namun masih kurang efektif. Hal ini misalnya terlihat ketika topik pembahasannya adalah perikanan. Pihak-pihak yang diundang sebaiknya merupakan individu atau kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan sektor perikanan untuk memastikan diskusi lebih relevan dan tepat sasaran.

B. Saran

- a. Diharapkan dapat membuat Manajemen dan Regulasi berbasis masyarakat yang mana mendorong model pengelolaan sumber daya untuk memastikan masyarakat lokal berperan besar dalam memanfaatkan potensi wilayahnya. Selain itu, perlu disusun peraturan yang membatasi akses pihak luar dan mengutamakan masyarakat lokal dalam pengelolaan potensi pariwisata.
- b. Diharapkan Pemerintah Desa Karimunjawa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga meski menghadapi keterbatasan finansial, warga tetap memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan peluang yang ada.
- c. Diharapkan Pemerintah Desa menunjuk staf yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran dan memberikan bantuan profesional kepada masyarakat penjual makanan khas di kawasan Alun-Alun Karimunjawa.
- d. Ketika mengadakan forum perlu melibatkan mereka yang terkait dengan isu yang dibahas, contoh rapat tentang pemberdayaan perikanan yang diundang adalah masyarakat yang berkaitan dengan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham zitri, Yudhi Lestanata, & Inka Nusamuda Pratama. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Jamal Al-Amin, & Afrizal Tjoetra. (2022). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 2(September), 85–95. <http://jurnal.utu.ac.id/SOCIETY/article/view/7069>
- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155. <https://doi.org/10.59837/jpmab.v1i4.75>
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164–171. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Pradini, G. (2022). MANFAAT EKONOMI KEGIATAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN JAKARTA SELATAN Economic Benefits of Community-Based Tourism Activities in Setu Babakan Betawi Cultural Village, South Jakarta. *Turn Journal*, 2(1), 47–57. <https://journal.unas.ac.id/turn/article/view/1764%0Ahttps://journal.unas.ac.id/turn/article/view/1764/1194>
- Purba, B., Tarigan, D. R., & Ginting, R. O. (2024). Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1071–1078. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.246>
- Rahman, K. R., Khotami, K., Ibrahim, A. Z., & Buana, D. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. *BERDAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02 (Oktober)), 9–16. <https://doi.org/10.25299/berdaya.2023.14768>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sari, H. D. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 20. <https://osf.io/preprints/pkdqw/%0Ahttps://osf.io/pkdqw/download>

- Siahaan, E., & Simanjuntak, M. (2024). Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah Pada Perkembangan Wisata Budaya Kampung Ulos Di *Panorama: Jurnal Kajian* ..., 1(2), 1–9. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/panorama/article/view/4407%0A> <https://ejournal.warunayama.org/index.php/panorama/article/download/4407/4083>
- Sodik, & Siyoto. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. *Dasar Metodologi Penelitian*, 83–84.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*
- Susanti, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.51825/hta.v1i2.11858>
- Tasbikhi, M. (2019). Saluran Distribusi Teori. *Repositori IAIN Kudus*, 8–33. http://repository.iainkudus.ac.id/2983/5/5. BAB II_to.pdf
- Titing Koerniawati, F. (2022). Destinasi Wisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Pariwisata Berkelanjutan. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i1.52>
- Wardani, A. K., & Riyadi, S. (2020). Analisis Pengaruh Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 6(November), 792–799.
- Wijayanto, F., & Susilawati, E. (2023). *Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribu di Desa Cibiru Wetan , Kecamatan Cileunyi , Kabupaten Bandung.* 2(02), 106–117. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i02>

Sumber website

<http://www.smkn1karimunjawa.sch.id/> Diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

<https://www.tourkarimunjawa.net/2018/01/hutan-mangrove-karimunjawa.html>

Diakses pada tanggal 25 Desember.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

A. Bagaimana ketersediaan tempat dan potensial bagi semua pelaku wisata

1. Bagaimana ketersediaan tempat wisata yang dapat diakses oleh semua pelaku wisata, baik wisatawan maupun penyedia layanan?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa tempat wisata dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pelaku wisata?
3. Bagaimana langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan dan potensi tempat wisata bagi semua pelaku wisata?

B. Bagaimana kesempatan ruang dan waktu yang di berikan ke semua pelaku wisata

1. Bagaimana kesempatan ruang yang disediakan di tempat wisata dapat memenuhi kebutuhan semua pelaku wisata?

2. Apa langkah yang dilakukan pengelola wisata untuk memastikan semua pelaku wisata mendapatkan kesempatan yang setara dalam memanfaatkan ruang dan waktu di lokasi wisata?
3. Apakah waktu operasional tempat wisata sudah mencakup kebutuhan berbagai jenis pelaku wisata, seperti wisatawan lokal dan mancanegara?

- C. Bagaimana distribusi terhadap ketersediaan produk pariwisata seperti kerajinan, makanan, layanan jasa bisa di manfaatkan semua pelaku wisata atau di nikmati oleh segelintir orang?

Berikut adalah tiga pertanyaan yang dapat dibuat dari kalimat tersebut:

1. Bagaimana cara memastikan distribusi ketersediaan produk pariwisata seperti kerajinan, makanan, dan layanan jasa dapat menjangkau semua pelaku wisata secara merata?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan produk pariwisata agar memberikan manfaat yang lebih inklusif bagi semua pihak terkait?
3. Apa kendala utama yang menyebabkan produk pariwisata hanya dinikmati oleh segelintir orang?

- D. Bagaimana komunikasi yang dibangun antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat pelaku wisata?

1. Seperti apa bentuk komunikasi yang ideal antara pemegang kekuasaan dan masyarakat pelaku wisata untuk mendukung perkembangan pariwisata?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun komunikasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat pelaku wisata?
3. Bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat pelaku wisata?

SURAT PENUNJUKAN DOSEN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55226, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 054/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Cholila Amaliyah
No. Mahasiswa	:	21520090
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI
• PROGAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SAJERKA, STATUS TERAKREDITASI BAN-SERAJ
• PROGAM STUDI S-1 KEGURUAN DAN PENDIDIKAN, PROGRAM KEGURUAN, STATUS TERAKREDITASI BAN-SERAJ
• PROGAM STUDI S-1 KEGURUAN DAN PENDIDIKAN, PROGRAM KEGURUAN, STATUS TERAKREDITASI BAN-SERAJ
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 920/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Cholila Amaliyah
No Mhs : 21520090
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemerintah Dalam Mendistribusikan Manfaat Sumber Daya Wisata
Tempat : Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.



SURAT KETERANGAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KARIMUNJAWA
PETINGGI KARIMUNJAWA

Jl. Pelabuhan No. 04 Karimunjawa Jepara Telp.(0297)312133 Kode Pos 59455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/Ds.Krjw/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Setiawan
Jabatan : Petinggi Karimunjawa
Alamat : Jl. Pelabuhan No. 04 Desa Karimunjawa Kec. Karimunjawa-Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cholila Amaliyah
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 13 November 2002
Alamat : Karimunjawa, RT003/ RW003, Karimunjawa, Jepara
Nama Kampus : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD)
"APMD" Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data melalui wawancara serta pengumpulan dokumen di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dalam rangka keperluan penyusunan tugas/skripsi yang berhubungan dengan studi di kampus yang bersangkutan.

Demikian surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Karimunjawa, 16 Januari 2024



DOKUMENTASI



Wawancara Kepala Desa Arif Setiawan



Wawancara Kasi Kesejahteraan dan pelayanan
solichul



Wawancara Kasi Pemerintahan Desa
Herman Effendi



Wawancara BPD Fahrul Alim



Wawancara BPD Muhammad Zaini



Wawancara Tokoh Masyarakat
Abdul Syukur



Wawancara Tokoh Masyarakat
Dafid Arianto



Wawancara Tokoh Masyarakat
Sholikul Hadi



Wawancara Paguyuban Kapal andri



Wawancara Pegawai Bank
Umroatul Hilaliyah



Wawancara Tukang Batu
Mafrundo

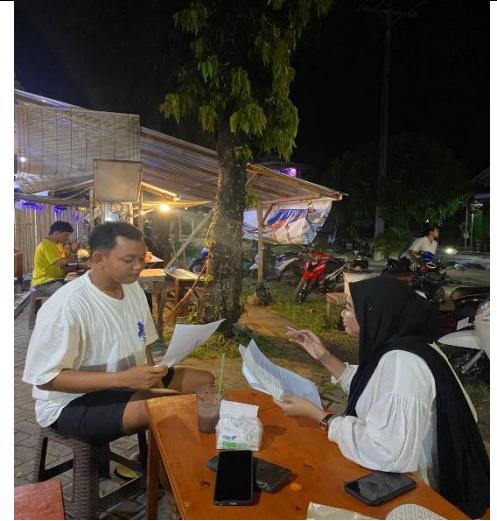


Wawancara Pedagang Solichatul Faiza



Wawancara Pemilik Hottel

Zaki Syaifudin



Wawancara Tour Guid

Yusuf Bakhtiar



Wawancara Nelayan

Eko Yunanto

revisi setelah sidang cholila amaliyah 21520090 2 februari
2025 (1).docx

ORIGINALITY REPORT

18 %
SIMILARITY INDEX

17 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.apmd.ac.id Internet Source	6 %
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
3	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
4	catatatanakhirsekolah.wordpress.com Internet Source	<1 %
5	id.123dok.com Internet Source	<1 %
6	lokasi-karimun-jawa.blogspot.com Internet Source	<1 %
7	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
8	Dewilna Helmi. "Deskripsi dan Potensi Wisata Tirta Sari Songsang Kabupaten Agama", Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya, 2022 Publication	<1 %